

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dikeluarkannya UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah telah membuka jalan bagi Pemerintah Daerah sebagai pemegang kekuasaan yang cukup signifikan. Dengan adanya hal ini reformasi tidak saja sekedar perubahan format lembaga, akan tetapi mencakup pembaharuan alat-alat yang digunakan untuk mendukung berjalannya lembaga-lembaga public secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel sehingga dapat terciptanya *good governance*.

Diberlakukannya UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ditandai dengan adanya hak, wewenang, dan kewajiban dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah agar mampu menyelenggarakan pemerintahan secara mandiri. Dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah, pendanaan merupakan salah satu unsur pokok untuk melaksanakan berbagai urusan pemerintah yang direalisasikan dalam pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan pembangunan, sehingga hal ini perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah diatur dalam fungsi perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah, fungsi penatausahaan keuangan daerah, dan fungsi pertanggungjawaban keuangan daerah. Dalam setiap fungsi tersebut Badan

Keuangan Daerah baik selaku Organisasi Perangkat Daerah memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar meliputi tugas dan kewenangan yang harus dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), Bendahara Umum Daerah (BUD) maupun selaku pengguna anggaran-SKPD.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Badan Keuangan Daerah mempunyai Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

1. Badan Keuangan Daerah merupakan unsur teknis Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Administrasi Umum.
2. Badan Keuangan Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan pemerintahan daerah di bidang keuangan.
3. Badan Keuangan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada point (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang keuangan Daerah.
 - b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan Daerah.
 - c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan Daerah.
 - d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang keuangan Daerah.

- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Kewenangan Badan Keuangan Daerah adalah :
- a. Menyiapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD.
 - b. Mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
 - c. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD.
 - d. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah.
 - e. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank/dan atau lembaga lain yang telah ditunjuk.
 - f. Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi.
 - g. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah.
 - h. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah.
 - i. Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah.
 - j. Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah.
 - k. Melakukan penagihan piutang daerah.
 - l. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.
 - m. Menyiapkan informasi keuangan daerah.

Sejalan dengan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Badan Keuangan Daerah dalam melaksanakan

tugas pokok, fungsi dan kewenangannya didukung oleh seorang kepala Badan, 1 orang Sekretaris dan 4 orang kepala Bidang, 3 orang kepala sub bagian dan 12 orang kepada sub bidang serta 57 staf pelaksana.

4.2 Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah

Struktur Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- a. Badan Keuangan Daerah terdiri atas 1 Sekretariat dan 3 Sub Bagian, 4 Bidang dan 12 Sub Bidang.
- b. Susunan Organisasi Badan Keuangan Daerah terdiri atas :
 - a. Kepala .
 - b. Sekretariat.
 - c. Bidang.
 - d. Sub Bagian.
 - e. Sub Bidang.
- c. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, sedangkan Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

4.3 Sistem, Prosedur Mekanisme dan Tata Kerja

Untuk menunjang pelaksanaan tugas Badan Keuangan Daerah, dengan mengacu pada ketentuan peraturan yang berlaku di bidang keuangan, maka beberapa aturan pendukung yang dipakai dalam pelaksanaan tugas sebagai berikut:

1. Peraturan Gubernur NTT tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah Provinsi NTT.

2. Keputusan Gubernur NTT tentang prosedur tetap pemberian hibah, bantuan sosial kepada kelompok masyarakat dan anggota masyarakat.
3. Keputusan Gubernur NTT tentang evaluasi terhadap peraturan daerah Kabupaten/Kota tentang APBD, Perubahan APBD maupun Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD setiap tahun anggaran.
4. Prosedur kerja tentang pembahasan anggaran, penatausahaan penerimaan dan pengeluaran, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan daerah.
5. Prosedur kerja yang berkaitan dengan tata naskah dinas.

4.4 Analisis Deskriptif

Adapun hasil analisis statistik deskriptif pada penelitian ini dapat dijabarkan pada tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Hasil Analisis Deskripsi (Rupiah)

	X1	X2	X3	X4	Y
Mean	1.114675	5.763411	2.427611	1.810010	1.865611
Median	4.853510	5.259211	1.808211	8.660009	1.542411
Maximum	1.321112	1.886712	2.370012	4.605711	1.035612
Minimum	1.862310	3.300011	7.570010	5.320009	6.117110
Std. Dev.	2.485711	2.792111	3.581211	5.530010	1.602811
Jarque-Bera	1046.063	601.6539	2544.681	10532.81	875.3025
Probability	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Observations	66	66	66	66	66

Sumber: Data Diolah Penulis, 2023

Berdasarkan hasil perhitungan yang didapat pada tabel 4.1 maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Variabel Dependen

Dari tabel statistika deskriptif, besarnya belanja modal mempunyai nilai rata-rata (mean) sebesar 1,865611, nilai minimum 6,117110, serta terlihat

pada tabel di atas standar deviasi sebesar 1,602811 maka dapat dikatakan bahwa data pada penelitian ini memiliki data yang seragam atau tidak variatif.

2. Variabel Independen

- a. Hasil analisis statistika deskriptif, besarnya pendapatan asli daerah mempunyai nilai rata-rata (mean) sebesar 1,114675, nilai minimum 1,862310, serta terlihat pada tabel di atas standar deviasi sebesar 2,485711 dimana dari data tersebut nilai rata-rata (mean) lebih besar dari nilai standar deviasi yang artinya bahwa data dalam penelitian ini bervariasi.
- b. Hasil analisis statistika deskriptif, besarnya dana alokasi umum mempunyai nilai rata-rata (mean) sebesar 5,763411, nilai minimum 3,300011, serta terlihat pada tabel di atas standar deviasi sebesar 2,792111 dimana dari data tersebut nilai rata-rata (mean) lebih besar dari nilai standar deviasi yang artinya bahwa data dalam penelitian ini bervariasi.
- c. Hasil analisis statistika deskriptif, besarnya dana alokasi khusus mempunyai nilai rata-rata (mean) sebesar 2,427611, nilai minimum 7,570010, serta terlihat pada tabel di atas standar deviasi sebesar 3,581211 dimana dari data tersebut nilai rata-rata (mean) lebih besar dari nilai standar deviasi yang artinya bahwa data dalam penelitian ini bervariasi.

d. Hasil analisis statistika deskriptif, besarnya dana alokasi khusus mempunyai nilai rata-rata (mean) sebesar 1,810010, nilai minimum - 5,320009, serta terlihat pada tabel di atas standar deviasi sebesar 5,530010 maka dapat dikatakan bahwa data pada penelitian ini memiliki data yang seragam atau tidak variatif.

4.5 Hasil dan Analisis Data

Berikut digambarkan penjelasan terkait variabel yang dipakai :

1) Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi yang dihitung dalam satuan rupiah per tahun (Y). Berikut ini di tampilkan tabel dan grafik Belanja Modal pada 22 Pemerintah Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 sampai dengan 2021 pada penelitian ini:

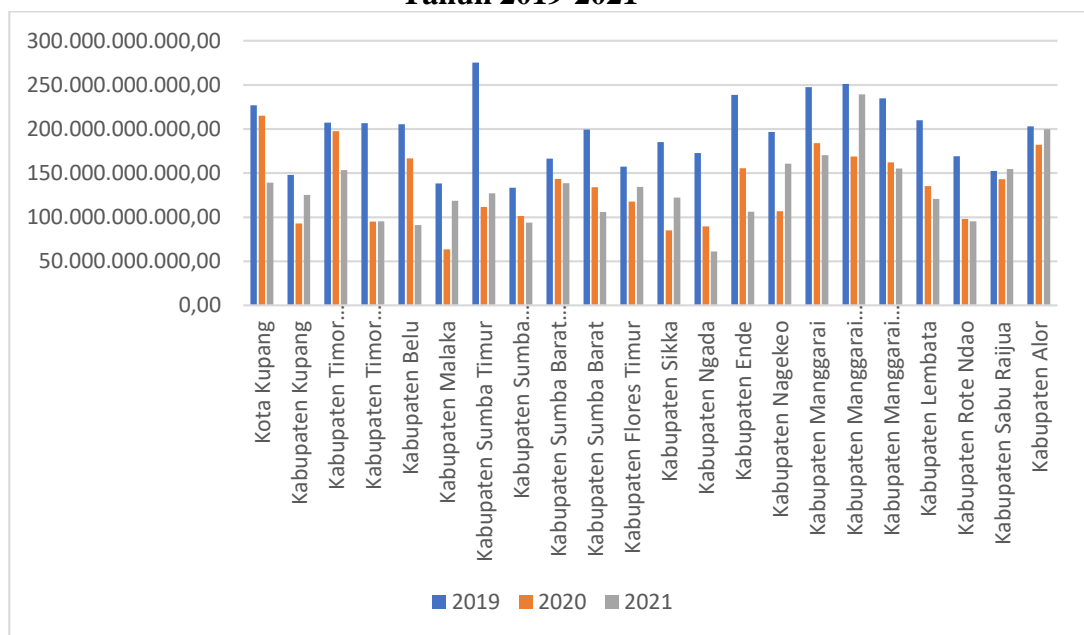
Tabel 4.2 Belanja Modal pada 22 Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 sampai dengan 2021

Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/ Kota	2019	2020	2021
Kota Kupang	227.005.574.045,26	215.108.464.791,00	139.242.758.940,47
Kabupaten Kupang	147.935.920.052,08	92.897.806.662,00	125.423.129.505,00
Kabupaten Timor Tengah Selatan	207.405.447.885,00	197.690.525.844,00	153.442.541.841,00
Kabupaten Timor Tengah Utara	206.620.321.011,00	94.941.053.656,00	95.339.824.282,00
Kabupaten Belu	205.315.185.502,00	166.759.538.676,00	91.153.681.066,58
Kabupaten Malaka	138.326.169.833,40	63.562.370.654,00	118.547.226.329,75
Kabupaten Sumba Timur	275.405.497.203,00	111.702.033.569,00	127.215.498.687,00
Kabupaten Sumba Tengah	133.476.075.050,89	101.533.843.544,00	93.761.438.999,00
Kabupaten Sumba Barat Daya	166.343.644.983,00	143.334.197.400,40	138.610.993.277,84
Kabupaten Sumba Barat	199.277.473.000,00	134.131.320.912,99	105.929.876.596,04
Kabupaten Flores Timur	157.377.998.980,00	117.828.282.894,50	134.217.774.056,81
Kabupaten Sikka	185.131.921.705,74	84.949.175.265,77	122.233.076.748,75
Kabupaten Ngada	172.875.645.872,17	89.624.991.658,64	61.147.642.473,86
Kabupaten Ende	238.849.149.541,00	155.618.904.848,58	106.266.690.696,00

Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/ Kota	2019	2020	2021
Kabupaten Nagekeo	196.824.084.290,90	106.848.121.514,29	160.764.895.832,65
Kabupaten Manggarai	247.565.309.728,00	183.822.861.986,00	170.311.027.113,00
Kabupaten Manggarai Timur	251.079.952.869,71	168.827.047.583,00	239.246.707.079,00
Kabupaten Manggarai Barat	234.750.409.552,00	162.155.214.141,00	155.314.293.370,00
Kabupaten Lembata	209.863.148.778,34	135.191.600.619,17	120.772.256.841,37
Kabupaten Rote Ndao	169.288.132.689,57	98.015.380.289,26	95.444.706.323,00
Kabupaten Sabu Raijua	152.461.715.606,00	143.040.845.397,00	154.764.830.261,62
Kabupaten Alor	203.058.083.778,00	182.191.533.921,78	199.655.638.616,00

Sumber: LRA 22 Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT

Grafik 4.1
Grafik Belanja Modal pada 22 kab/Kota se-Provinsi NTT
Tahun 2019-2021



Sumber: Data diolah, 2023

Dari tabel dan grafik di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2019 Belanja Modal Kabupaten Sumba Timur lebih besar dari 21 kabupaten/ kota, sedangkan Kabupaten Sumba Tengah menjadi kabupaten dengan alokasi belanja modal terendah diantara Pemerintah kabupaten/ kota lainnya. Pada Tahun 2020 Belanja Modal Kota Kupang menjadi yang terbesar, dan pada tahun 2021 belanja modal terbesar dialokasikan oleh Kabupaten Manggarai

Timur. Sedangkan kabupaten dengan alokasi belanja modal terkecil pada tahun 2020 dan 2021 adalah Kabupaten Malaka dan Kabupaten Ngada.

- 2) Pendapatan Asli Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, yang dihitung dalam satuan rupiah per tahun (X1). Berikut ini di tampilkan tabel dan grafik Pendapatan Asli Daerah yang di gunakan dalam penelitian ini.

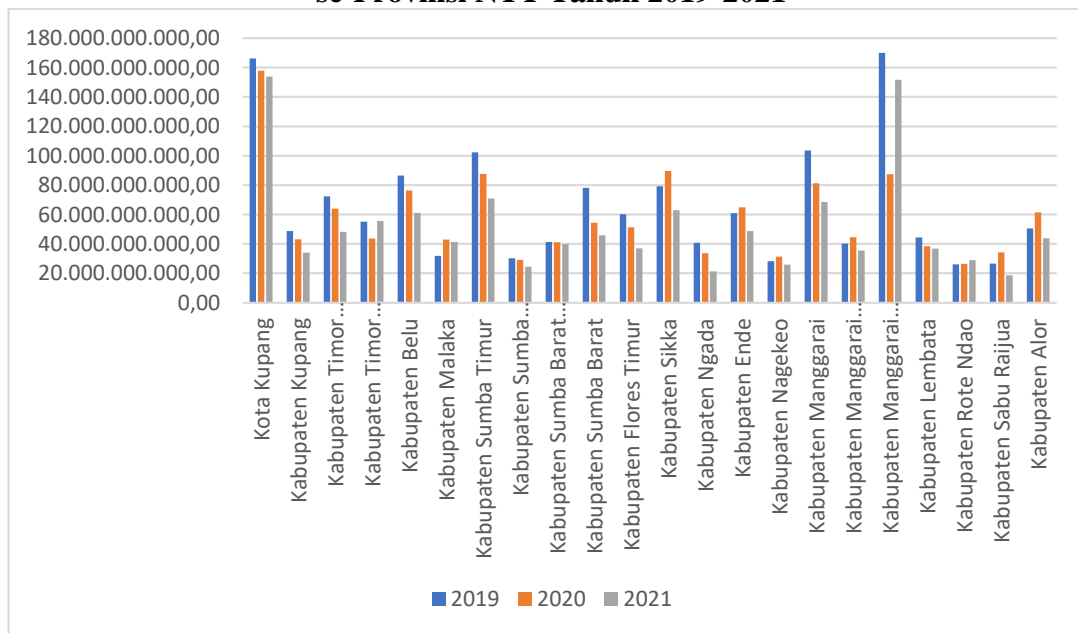
Tabel 4.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 22 Kabupaten/ Kota se-Provinsi NTT Tahun 2019-2021

Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota	2019	2020	2021
Kota Kupang	166.203.161.383,57	157.862.168.641,31	153.941.262.971,21
Kabupaten Kupang	48.725.556.774,95	43.079.702.699,00	34.027.889.599,98
Kabupaten Timor Tengah Selatan	72.367.125.683,11	63.989.007.610,46	48.310.558.084,07
Kabupaten Timor Tengah Utara	55.155.723.210,62	43.654.391.464,64	55.745.506.637,46
Kabupaten Belu	86.449.590.880,98	76.346.068.910,38	61.174.730.135,81
Kabupaten Malaka	31.910.567.963,00	43.044.088.072,00	41.260.245.923,29
Kabupaten Sumba Timur	102.267.318.040,29	87.672.976.884,98	70.868.559.755,71
Kabupaten Sumba Tengah	30.335.621.531,28	29.255.031.731,42	24.511.355.918,86
Kabupaten Sumba Barat Daya	41.333.918.626,70	41.093.876.682,15	39.935.029.960,25
Kabupaten Sumba Barat	78.233.376.016,72	54.414.967.630,04	45.828.890.858,00
Kabupaten Flores Timur	60.245.857.471,89	51.265.497.469,36	36.967.605.935,45
Kabupaten Sikka	79.239.104.306,28	89.635.519.712,18	62.862.244.642,11
Kabupaten Ngada	40.706.414.869,85	33.662.627.041,91	21.359.214.723,58
Kabupaten Ende	60.994.745.886,81	64.885.133.744,65	48.717.050.656,31
Kabupaten Nagekeo	28.327.840.099,02	31.282.088.315,46	25.914.676.826,26
Kabupaten Manggarai	103.561.377.954,77	81.325.840.359,01	68.630.940.323,10
Kabupaten Manggarai Timur	40.152.816.777,37	44.577.381.653,57	35.549.715.863,14
Kabupaten Manggarai Barat	169.920.911.284,19	87.450.970.737,97	151.755.218.755,99
Kabupaten Lembata	44.444.504.148,95	38.465.849.611,69	36.768.106.529,39
Kabupaten Rote Ndao	26.096.988.104,30	26.418.063.411,77	28.916.614.296,35

Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota	2019	2020	2021
Kabupaten Sabu Raijua	26.660.839.267,00	34.159.277.348,45	18.622.427.335,00
Kabupaten Alor	50.497.507.797,56	61.512.615.909,31	43.805.838.931,83

Sumber: LRA 22 Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT

Grafik 4.2
Grafik Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada 22 Kabupaten/ Kota se-Provinsi NTT Tahun 2019-2021



Sumber: Data diolah, 2023

Dari tabel dan grafik di atas dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Tahun 2019 PAD tertinggi untuk 22 kabupaten/ kota se-Provinsi NTT adalah Kabupaten Manggarai Barat, sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Rote Ndao. Tahun 2020 dan 2021 Kota Kupang menjadi pemda dengan PAD yang terbesar dari semua kabupaten/ kota di Provinsi NTT, sedangkan PAD terendah ada pada Kabupaten Rote Ndao untuk tahun 2020 dan Kabupaten Sabu Raijua untuk tahun 2021.

- 3) Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan

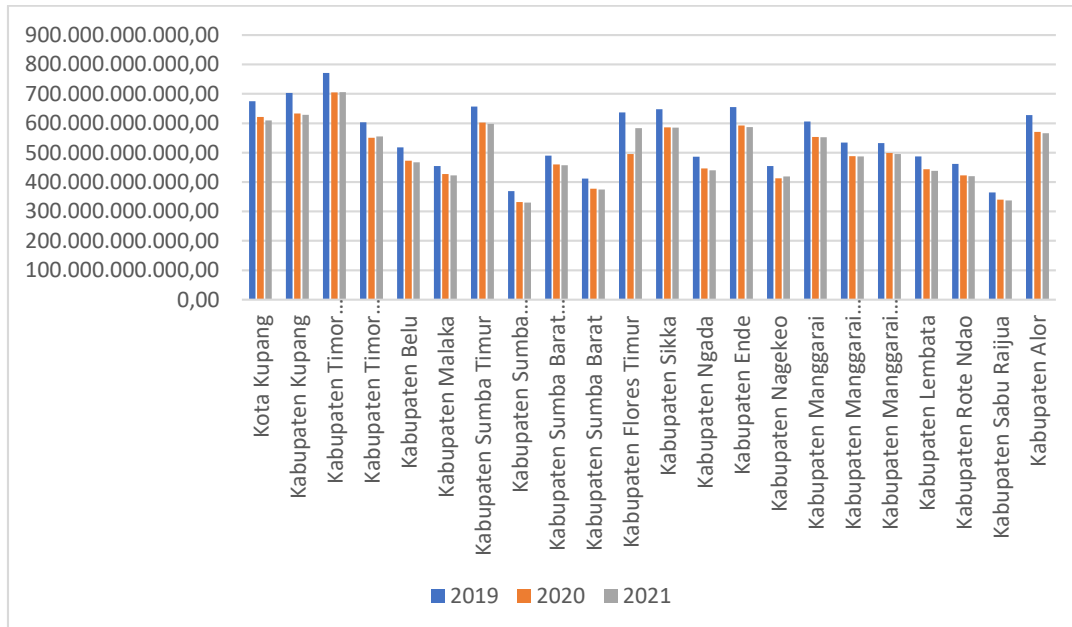
antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi, yang dihitung dalam satuan rupiah per tahun (X2). Berikut ini ditampilkan tabel dan grafik Dana Alokasi Umum yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 4.4 Dana Alokasi Umum (DAU) pada 22 Kabupaten/ Kota se-Provinsi NTT Tahun 2019-2021

Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota	2019	2020	2021
Kota Kupang	674.841.601.000,00	621.573.538.000,00	609.915.054.000,00
Kabupaten Kupang	703.344.472.000,00	633.088.936.000,00	629.001.506.000,00
Kabupaten Timor Tengah Selatan	771.270.719.000,00	704.510.671.000,00	705.697.225.000,00
Kabupaten Timor Tengah Utara	603.488.889.000,00	551.022.165.207,00	554.675.820.000,00
Kabupaten Belu	517.570.214.000,00	472.964.568.000,00	466.681.212.000,00
Kabupaten Malaka	454.162.076.000,00	427.260.857.000,00	422.349.168.000,00
Kabupaten Sumba Timur	656.773.858.000,00	602.646.801.000,00	597.431.647.000,00
Kabupaten Sumba Tengah	369.246.880.000,00	332.306.536.000,00	329.966.452.000,00
Kabupaten Sumba Barat Daya	489.729.129.000,00	459.832.302.000,00	456.661.628.000,00
Kabupaten Sumba Barat	411.342.783.000,00	377.323.812.000,00	374.122.233.514,00
Kabupaten Flores Timur	637.205.935.000,00	495.665.645.000,00	583.023.737.000,00
Kabupaten Sikka	647.862.407.000,00	586.220.258.000,00	585.125.645.896,00
Kabupaten Ngada	485.963.235.200,00	445.805.432.000,00	439.418.102.000,00
Kabupaten Ende	654.994.752.000,00	592.619.007.000,00	586.973.668.000,00
Kabupaten Nagekeo	454.351.825.000,00	412.477.821.000,00	419.118.198.458,00
Kabupaten Manggarai	606.097.107.000,00	553.097.333.000,00	552.025.297.000,00
Kabupaten Manggarai Timur	533.974.640.000,00	488.307.791.000,00	486.677.418.000,00
Kabupaten Manggarai Barat	532.878.109.000,00	498.893.859.000,00	495.133.465.000,00
Kabupaten Lembata	487.100.063.000,00	443.588.603.000,00	437.999.954.000,00
Kabupaten Rote Ndao	461.383.019.000,00	422.697.359.000,00	419.624.046.000,00
Kabupaten Sabu Raijua	364.485.840.000,00	339.973.471.000,00	336.885.937.000,00
Kabupaten Alor	627.365.367.000,00	570.797.079.000,00	565.598.771.000,00

Sumber: LRA 22 Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT

Grafik 4.3
Grafik Dana Alokasi Umum Grafik (DAU) pada 22 Kabupaten/ Kota
se-Provinsi NTT Tahun 2019-2021



Sumber: Data diolah, 2023

Dari tabel dan grafik di atas dapat dilihat bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) pada Tahun 2019, 2020, dan 2021 yang terbesar terdapat pada Kabupaten Timor Tengah Selatan, sedangkan DAU yang paling minimal pada tahun 2019 dan 2020 terdapat pada Kabupaten Sabu Raijua dan pada tahun 2021 terdapat pada Kabupaten Sumba Tengah.

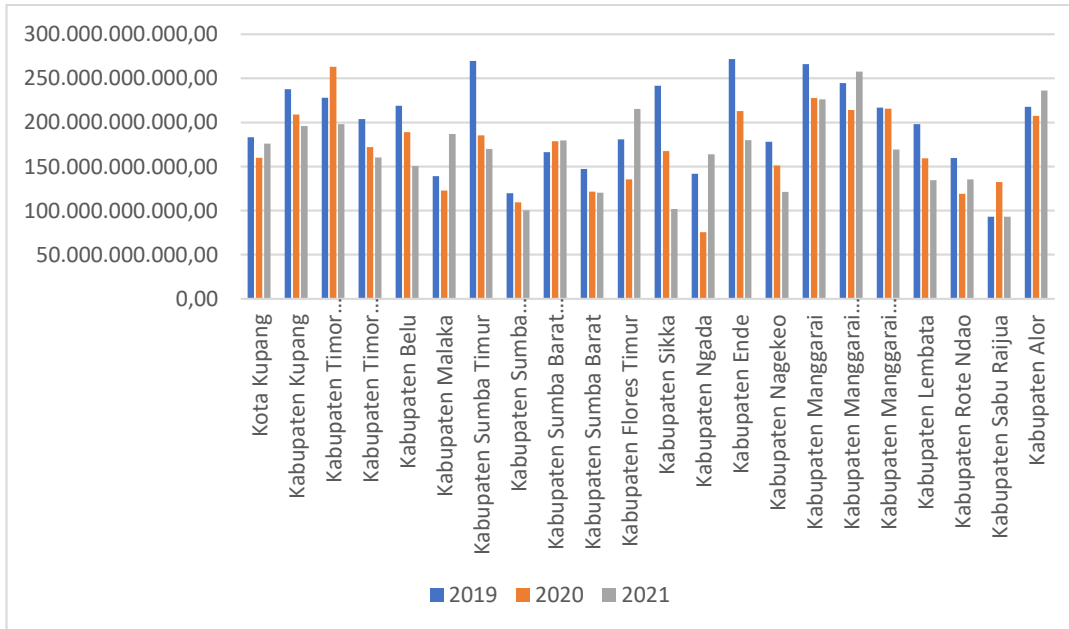
- 4) Dana Alokasi Khusus (DAK), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, yang dihitung dalam satuan rupiah per tahun (X3). Berikut ini di tampilkan table dan grafik Dana Alokasi Khusus yang di gunakan dalam penelitian ini.

Tabel 4.5 Dana Alokasi Khusus (DAK) pada 22 Kabupaten/ Kota se-Provinsi NTT Tahun 2019-2021

Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota	2019	2020	2021
Kota Kupang	183.184.883.667,00	159.982.554.705,00	176.099.735.607,00
Kabupaten Kupang	237.726.152.609,00	208.839.033.428,00	195.835.147.942,00
Kabupaten Timor Tengah Selatan	227.995.293.335,00	263.059.591.357,00	198.176.703.743,00
Kabupaten Timor Tengah Utara	203.856.747.510,00	172.182.313.372,00	160.217.714.529,00
Kabupaten Belu	218.919.932.831,00	188.896.258.731,00	150.574.530.032,00
Kabupaten Malaka	139.214.108.693,00	122.699.634.928,00	186.824.366.259,00
Kabupaten Sumba Timur	269.724.918.162,00	185.343.927.090,00	169.781.910.930,00
Kabupaten Sumba Tengah	119.719.646.872,00	109.440.323.019,00	100.311.804.125,00
Kabupaten Sumba Barat Daya	166.229.443.063,00	178.699.677.623,00	179.491.534.417,00
Kabupaten Sumba Barat	147.118.718.357,00	121.466.736.127,00	120.415.697.524,00
Kabupaten Flores Timur	180.901.963.583,00	135.331.009.952,00	215.324.031.552,00
Kabupaten Sikka	241.485.916.714,00	167.512.233.397,00	101.734.823.353,00
Kabupaten Ngada	141.795.414.975,00	75.676.937.796,00	163.785.022.365,00
Kabupaten Ende	271.923.106.395,00	212.772.057.231,00	179.773.502.068,00
Kabupaten Nagekeo	178.077.569.952,00	151.055.508.740,00	121.284.707.710,00
Kabupaten Manggarai	265.966.354.417,00	227.636.532.967,00	226.065.982.260,00
Kabupaten Manggarai Timur	244.514.647.132,00	214.100.226.753,00	257.562.218.995,00
Kabupaten Manggarai Barat	216.891.072.985,00	215.666.938.326,00	169.311.245.579,00
Kabupaten Lembata	198.002.891.169,00	159.410.366.365,00	134.387.766.725,00
Kabupaten Rote Ndao	159.621.474.083,00	119.118.831.668,00	135.509.110.695,00
Kabupaten Sabu Raijua	93.020.352.447,00	132.531.801.356,00	93.054.809.256,00
Kabupaten Alor	217.562.552.116,00	207.348.502.813,00	236.141.584.351,00

Sumber: LRA 22 Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT

Grafik 4.4
Grafik Dana Alokasi Umum Khusus (DAK) pada 22 Kabupaten/ Kota
se-Provinsi NTT Tahun 2019-2021



Sumber: Data diolah, 2023

Dari tabel dan grafik di atas dapat dilihat bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Tahun 2019 terbanyak pada Kabupaten Ende, sedangkan yang DAK paling sedikit terdapat pada Kabupaten Sabu Raijua. Pada tahun 2020, DAK terbanyak pada Kabupaten Timor Tengah Selatan dan yang paling kecil terdapat di Kabupaten Ngada, dan pada tahun 2021 DAK terbanyak terdapat di Kabupaten Manggarai Timur dan yang terendah sama seperti pada tahun 2019 yakni Kabupaten Sabu Raijua.

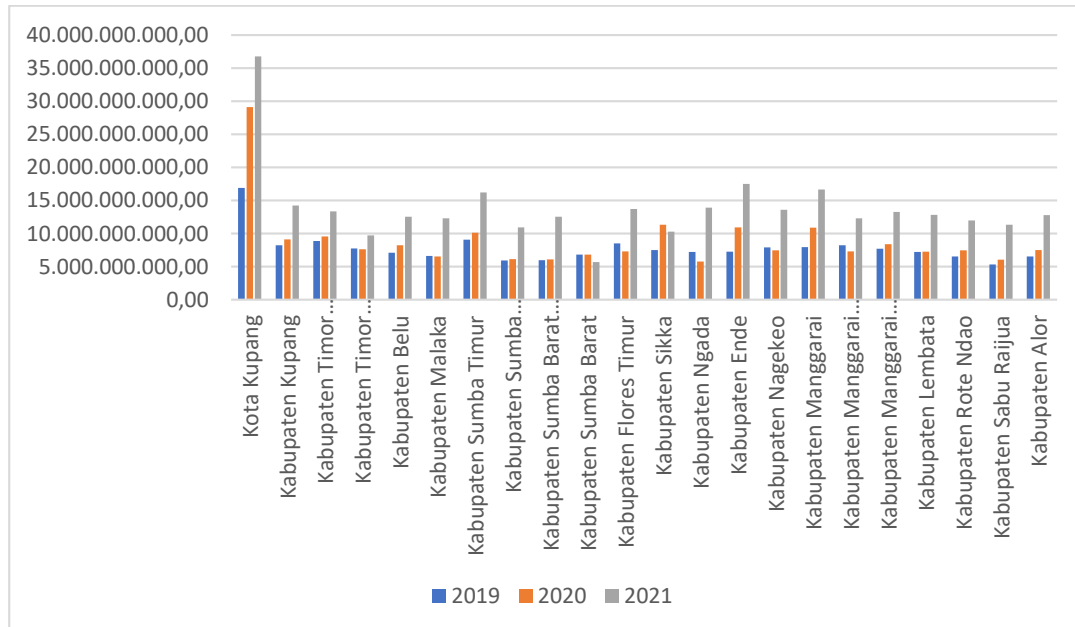
- 5) Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi, yang dihitung dalam satuan rupiah per tahun (X4). Berikut ini di tampilkan table dan grafik Dana Bagi Hasil yang di gunakan dalam penelitian ini:

Tabel 4.6 Dana Bagi Hasil (DBH) pada 22 Kabupaten/ Kota se-Provinsi NTT Tahun 2019-2021

Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota	2019	2020	2021
Kota Kupang	16.870.245.633,00	29.126.545.102,00	36.789.683.606,00
Kabupaten Kupang	8.224.330.000,00	9.087.801.780,00	14.209.194.982,00
Kabupaten Timor Tengah Selatan	8.841.569.902,00	9.559.538.274,00	13.341.660.402,00
Kabupaten Timor Tengah Utara	7.743.440.825,00	7.626.364.469,00	9.723.693.373,00
Kabupaten Belu	7.101.462.284,00	8.218.630.842,00	12.534.500.655,00
Kabupaten Malaka	6.592.583.732,00	6.534.671.368,00	12.281.443.540,00
Kabupaten Sumba Timur	9.078.580.583,00	10.107.838.514,00	16.219.532.858,00
Kabupaten Sumba Tengah	5.935.446.840,00	6.131.781.602,00	10.904.336.557,00
Kabupaten Sumba Barat Daya	5.954.875.300,00	6.089.202.308,00	12.532.076.386,00
Kabupaten Sumba Barat	6.809.560.350,00	6.809.560.350,00	5.671.254.746,00
Kabupaten Flores Timur	8.484.970.995,00	7.276.150.341,00	13.699.695.010,00
Kabupaten Sikka	7.486.535.849,00	11.341.533.627,00	10.256.456.231,00
Kabupaten Ngada	7.189.603.851,00	5.766.221.075,00	13.887.428.490,00
Kabupaten Ende	7.254.987.187,00	10.902.673.397,00	17.474.700.708,00
Kabupaten Nagekeo	7.886.403.739,00	7.447.436.718,00	13.567.127.294,00
Kabupaten Manggarai	7.944.385.093,00	10.881.906.500,00	16.659.439.792,00
Kabupaten Manggarai Timur	8.235.680.709,00	7.298.352.609,00	12.294.873.987,00
Kabupaten Manggarai Barat	7.696.544.335,00	8.395.261.296,00	13.263.365.170,00
Kabupaten Lembata	7.201.282.222,00	7.259.344.408,00	12.800.921.362,00
Kabupaten Rote Ndao	6.537.826.650,00	7.461.942.300,00	11.947.941.056,00
Kabupaten Sabu Raijua	5.315.832.729,00	6.054.125.186,00	11.333.430.516,00
Kabupaten Alor	6.510.201.154,00	7.475.315.990,00	12.767.909.996,00

Sumber: LRA 22 Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT

Grafik 4.5
Grafik Dana Bagi Hasil (DBH) pada 22 Kabupaten/ Kota
se-Provinsi NTT Tahun 2019-2021



Sumber: Data diolah, 2023

Dari tabel dan grafik di atas dapat dilihat bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun 2019 sampai dengan 2021 terbanyak pada Kota Kupang sedangkan DBH minimal pada tahun 2019 terdapat di Kabupaten Sabu Raijua, pada tahun 2020 terdapat di Kabupaten Ngada dan pada tahun 2021 di Kabupaten Sumba Barat.

4.6 Model Regresi Data Panel

Selanjutnya Model Estimasi Data Panel yang digunakan adalah Common Effect Model dengan mengkombinasikan data *times series* dan data *cross sections*. Pada common effect model diasumsikan bahwa tidak ada perbedaan nilai intersep dan slope pada hasil regresi baik atas dasar perbedaan antar individu maupun antar waktu. Metode pendugaan parameter pada common effect model menggunakan

metode *Ordinary Least Square* (OLS). Hasil regresi data panel dengan *Common Effect Model* disajikan pada Tabel berikut ini:

Tabel 4.7
Hasil Uji *Common Effect Model*

Dependent Variable: Y				
Method: panel Least Squares				
Date: 12/01/23 Time: 23:42				
Sample: 1 69 (2019-2021)				
Cross-section included: 22				
Total panel (unbalanced) observation :65				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1,22E+10	2.97E+11	4.127435	0.0001
X1	0.632840	0.0211493	2.992250	0.0040
X2	-0.076365	0.084224	-0,906687	0.3682
X3	0.0191437	0.0174692	1.095852	0.2775
X4	0.045421	1.302033	0.034884	0.9723
R-squared	0.194636	Mean dependent var		1.54E+11
Adjusted R-squared	0.140945	S.D. dependent var		4.96E+11
S.E. of regression	4.60E+10	Akaike info criterion		52.01348
Sum squared resid	1.27E+23	Schwarz criterion		52.18074
Log likelihood	-1685.438	Hannan-Quinn criter.		52.07947
F-statistic	3.625113	Durbin-Watson stat		1.536132
Prob(F-statistic)	0.010346			

Sumber : Hasil pengolahan Eviews 12

Dilihat dari hasil olah data yang telah dilakukan maka memperoleh hasil yang dilihat dari R-squared bernilai 0.194636, nilai ini mempunyai makna bahwa variabel terikat atau X dapat menjelaskan 19,46% terhadap variabel bebas atau Y. Kemudian sisanya yakni sebesar 80,54% dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak dipakai sebagai model dalam penelitian ini.

4.7 Pemilihan pada Model Regresi

Dalam model regresi data panel mempunyai tiga macam model, yakni regresi Common efek, Fixed efek dan Randorm efek. Maka perlu dilakukan

uji pemilihan model agar dapat memperoleh dugaan yang efisien. Hasil uji pemilihan model sebagai berikut :

1. Uji Chou

Pengujian ini diolah untuk melihat model mana yang lebih baik antara model common efek dengan model fixed efek dengan menggunakan uji hipotesis yaitu:

- a. HO : memilih menggunakan estimasi model common efek
- b. HI : memilih menggunakan estimasi model fixed efek

Untuk melakukan pengujian pemilihan estimasi common efek atau fixed efek dapat dilakukan dengan melihat p-value apabila signifikansi ($\leq 5\%$), jadi model yang dipakai adalah Fixed effect. Sedangkan ketika P Value tidak signifikan ($\geq 5\%$), maka model yang dipakai adalah model common efek.

Tabel 4.8
Hasil Uji Chou

Redundant Fixed Effects Tests			
Equation: FE			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	2.679301	(21,40)	0.0036
Cross-section Chi-square	57.963089	21	0.0000

Sumber : Hasil pengolahan Eviews 12

Nilai distribusi Chi-Square dari hasil yang diperoleh dengan menggunakan Eviews 12 adalah 57.96,3089 dengan probabilitas 0.0000 (<

5%) sehingga gagal menolak HI, maka model yang dipakai adalah model estimasi Fixed efek.

2. Uji Hausman

Pengujian Hausman diolah untuk melihat model estimasi yang paling baik antara model estimasi fixed efek dan random efek. Uji hipotesisnya sebagai berikut:

- a. HO: memilih menggunakan estimasi model random efek
- b. HI: memilih menggunakan estimasi model fixed efek

Untuk melakukan pengujian Hausman, maka dapat melihat dari nilai P-Value apabila signifikan ($\leq 5\%$), jadi model yang dipakai adalah model estimasi Fixed efek. Sedangkan jika P-Value tak signifikan ($\geq 5\%$), maka model yang dipakai adalah estimasi Random efek.

Tabel 4.9
Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test			
Equation: RE			
Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	29.825038	4	0.0000

Sumber : Hasil pengolahan Eviews 12

Nilai distribusi Chi-Square dari perhitungan menggunakan Eviews 12 adalah sebesar 29.825,038 dengan probabilitas 0.0000 (kurang dari 5%) sehingga gagal menolak HI, maka model yang dipakai adalah model estimasi *Fixed effect*.

4.8 Pengujian Asumsi dan Kesesuaian Model

1. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik atas persamaan regresi berganda yang digunakan. Terdapat empat asumsi klasik yang harus dipenuhi sebelum dilakukannya regresi pada model persamaan yaitu normalitas, multikolonieritas, autokorelasi, heteroskedastisitas.

a. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Dalam penelitian ini, peneliti untuk melakukan pengujian multikolinearitas menggunakan Pearson Correlation. Kriteria Pearson Correlation untuk uji multikolinearitas adalah jika nilai koefisien korelasinya melebihi 0,9 sesuai dengan Gujarati (2009) yang mengungkapkan untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas.

Tabel 4.10
Hasil Pengujian Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas	
Variable	Centered VIF
X1	1.000000
X2	0.462603
X3	0.327833
X4	0.479225

Sumber : Hasil pengolahan Eviews 12

Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa seluruh nilai Variance Inflation Factor (VIF) < 10, maka disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas pada seluruh variabel (model regresi tersebut baik).

b. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan uji white. Ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat diketahui dari nilai probabilitas Obs*R- square yang nantinya akan dibandingkan dengan tingkat signifikansi. Jika nilai probabilitas signifikansinya di atas 0,05 maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Adapun hasil pengujian uji heteroskedastisitas yang tunjukkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.11
Hasil Pengujian Uji Heteroskedastisitas

F-statistic	1.046153	Prob. F(14,51)	0.4260
Obs*R-squared	14.72509	Prob. Chi-Square(14)	0.3972
Scaled explained SS	8.384548	Prob. Chi-Square(14)	0.8683

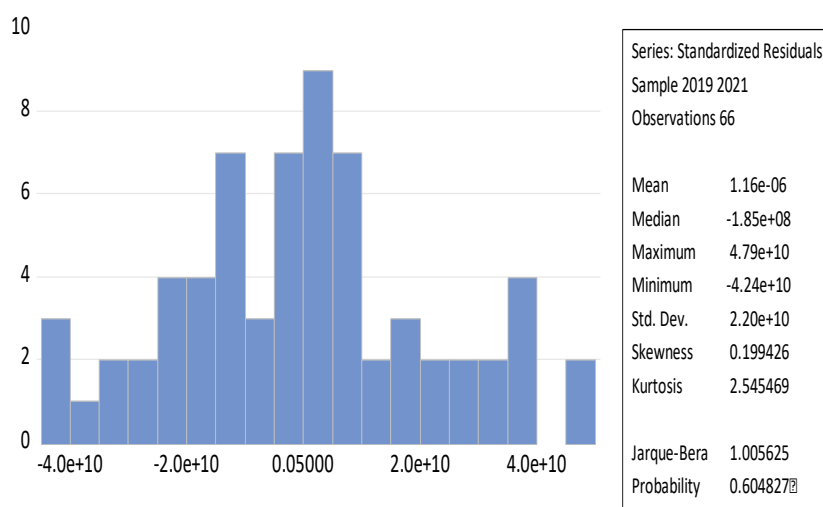
Sumber : Hasil pengolahan Eviews 12

Berdasarkan hasil pengujian yang tunjukkan oleh tabel di atas, diketahui bahwa nilai probabilitas Obs*R- square sebesar 0,3975. Hal ini sesuai dengan kriteria pengujian uji white bahwa hasil dari uji white memiliki nilai probabilitas Obs*R- square lebih besar daripada signifikansi (0,3975. >0,05). Maka dapat diambil kesimpulan bahwa data tidak memiliki masalah heteroskedasitas sebab sesuai dengan ketentuan melebihi tingkat signifikan.

c. Uji Normalitas

Adapun hasil pengujian uji normalitas yang tunjukkan pada gambar 4.6 sebagai berikut:

Gambar 4.6
Hasil Pengujian Uji Normalitas



Sumber : Hasil pengolahan Eviews 12

Berdasarkan hasil pengujian yang tunjukkan oleh gambar 4.1, diketahui bahwa probability signifikan lebih besar dari 0,05. Hal ini sesuai dengan kriteria pengujian yang telah dijabarkan terlihat bahwa hasil dari uji normalitas yaitu probability sebesar 0,604827 lebih besar dari 0,05 maka dapat diambil kesimpulan bahwa data berdistribusi normal.

d. Uji Autokorelasi

Adapun hasil pengujian uji autokorelasi yang tunjukkan pada tabel IV.4 sebagai berikut:

Tabel 4.12
Hasil Pengujian Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi Durbin Watson	
Durbin-Watson stat	1.967150

Sumber : Hasil pengolahan Eviews 12

Hasil Uji autokorelasi menunjukkan bahwa nilai Durbin-Watson sebesar 1,96, maka nilai Durbin-Watson berada pada $-2 < 1,96 < +2$ yang berarti tidak autokorelasi.

2. Uji Hipotesis

a. Uji Parsial (Uji t)

Uji t bertujuan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara parsial atau individual berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Pengujian uji t dilakukan dengan menggunakan kriteria berdasarkan perbandingan nilai t-statistik (thitung) dari masing-masing koefisien variabel independen terhadap nilai tabel dan juga berdasarkan probabilitas. Adapun hasil pengujian uji t yang tunjukkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.13
Hasil Uji t

Dependent Variable: Y
Method: Panel Least Squares
Date: 12/01/23 Time: 23:42
Sample: 2019 2021
Periods included: 3
Cross-sections included: 22
Total panel (unbalanced) observations: 65

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.22E+11	2.97E+10	4.127435	0.0001
X1	0.632840	0.211493	2.992250	0.0040
X2	-0.076365	0.084224	-0.906687	0.3682
X3	0.191437	0.174692	1.095852	0.2775
X4	0.045421	1.302033	0.034884	0.9723
R-squared	0.194636	Mean dependent var	1.54E+11	
Adjusted R-squared	0.140945	S.D. dependent var	4.96E+10	
S.E. of regression	4.60E+10	Akaike info criterion	52.01348	
Sum squared resid	1.27E+23	Schwarz criterion	52.18074	
Log likelihood	-1685.438	Hannan-Quinn criter.	52.07947	
F-statistic	3.625113	Durbin-Watson stat	1.536132	
Prob(F-statistic)	0.010346			

Sumber : Hasil pengolahan Eviews 12

Berdasarkan hasil pengujian yang tunjukkan oleh tabel di atas, maka dapat dijelaskan pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen sesuai dengan hipotesis-hipotesis yang telah disebutkan dalam bab 2. Berikut merupakan paparkan penjelasan pengujian hipotesis-hipotesis tersebut:

1) Pendapatan Asli Daerah

Hasil uji t variabel pendapatan asli daerah menunjukkan nilai t hitung sebesar 2.992250 dengan nilai signifikan sebesar 0.0040 lebih kecil dari tingkat alfa yang digunakan 0.05, maka keputusan menerima hipotesis alternatif (H_a) dan menolak hipotesis nol (H_0), artinya secara parsial variabel pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan

signifikan terhadap Belanja Modal pada 22 kabupaten/ kota se-
Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2) Dana Alokasi Umum

Hasil uji t variabel Dana Alokasi Umum menunjukkan nilai t hitung sebesar -0.906687 dengan nilai signifikan sebesar 0.3682 > dari tingkat alfa yang digunakan 0.05, maka keputusan menolak hipotesis alternative (H_a) dan menerima hipotesis nol (H_0), artinya secara parsial variabel Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Belanja Modal pada 22 kabupaten/ kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur.

3) Dana Alokasi Khusus

Hasil uji t variabel Dana Alokasi Khusus menunjukkan nilai t hitung sebesar 1.095852 dengan nilai signifikan sebesar 0.2775 lebih besar dari tingkat alfa yang digunakan yakni 0.05, maka keputusan yang diambil adalah menolak hipotesis alternative (H_a) dan menerima hipotesis nol (H_0), artinya secara parsial variabel Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Belanja Modal pada 22 kabupaten/ kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur.

4) Dana Bagi Hasil

Hasil uji t variabel Dana Bagi Hasil menunjukkan nilai t hitung sebesar 0.034884 dengan nilai signifikan sebesar

0.9723 yang lebih besar dari tingkat alfa yang digunakan yakni 0.05, maka keputusan yang diambil adalah menolak hipotesis alternative (Ha) dan menerima hipotesis nol (H0), artinya secara parsial variabel Dana Bagi Hasil berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Belanja Modal pada 22 kabupaten/ kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur.

b. Uji Simultan (Uji F)

Uji simultan bertujuan untuk menguji secara bersama-sama pengaruh variabel pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil terhadap Belanja Modal pada 22 kabupaten/ kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur. Adapun hasil pengujian uji F dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.14
Uji Simultan

Dependent Variable: Y
Method: Panel Least Squares
Date: 12/01/23 Time: 23:42
Sample: 2019 2021
Periods included: 3
Cross-sections included: 22
Total panel (unbalanced) observations: 65

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.22E+11	2.97E+10	4.127435	0.0001
X1	0.632840	0.211493	2.992250	0.0040
X2	-0.076365	0.084224	-0.906687	0.3682
X3	0.191437	0.174692	1.095852	0.2775
X4	0.045421	1.302033	0.034884	0.9723
R-squared	0.194636	Mean dependent var	1.54E+11	
Adjusted R-squared	0.140945	S.D. dependent var	4.96E+10	
S.E. of regression	4.60E+10	Akaike info criterion	52.01348	
Sum squared resid	1.27E+23	Schwarz criterion	52.18074	
Log likelihood	-1685.438	Hannan-Quinn criter.	52.07947	
F-statistic	3.625113	Durbin-Watson stat	1.536132	
Prob(F-statistic)	0.010346			

Sumber : Hasil pengolahan Eviews 12

Pengujian F-statistik ini digunakan untuk mengetahui signifikansi variabel independent secara bersama-sama apakah berpengaruh terhadap variabel dependent. Nilai F-Statistik adalah 3.625113 dan untuk nilai probabilitasnya sebesar $0.01 < 0,05$ (α) yang berarti secara bersama-sama variabel pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal pada 22 kabupaten/ kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur.

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan variabel independen untuk menerangkan variabel dependen. Pengujian koefisien determinasi (R^2) dilakukan dengan menggunakan Adjusted R-Squared pada persamaan regresi. Adjusted R-Squared mencerminkan seberapa besar perubahan variabel dependen yang dapat ditentukan oleh perubahan variabel-variabel independen. Nilai koefisien determinasi (R^2), semakin tinggi (mendekati satu) berarti semakin kuat hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Adapun hasil pengujian koefisien determinasi (R^2) yang tunjukkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.15
Hasil Pengujian Koefisien Determinasi (R^2)

Dependent Variable: Y
Method: Panel Least Squares
Date: 12/01/23 Time: 23:42
Sample: 2019 2021
Periods included: 3
Cross-sections included: 22
Total panel (unbalanced) observations: 65

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.22E+11	2.97E+10	4.127435	0.0001
X1	0.632840	0.211493	2.992250	0.0040
X2	-0.076365	0.084224	-0.906687	0.3682
X3	0.191437	0.174692	1.095852	0.2775
X4	0.045421	1.302033	0.034884	0.9723
R-squared	0.194636	Mean dependent var	1.54E+11	
Adjusted R-squared	0.140945	S.D. dependent var	4.96E+10	
S.E. of regression	4.60E+10	Akaike info criterion	52.01348	
Sum squared resid	1.27E+23	Schwarz criterion	52.18074	
Log likelihood	-1685.438	Hannan-Quinn criter.	52.07947	
F-statistic	3.625113	Durbin-Watson stat	1.536132	
Prob(F-statistic)	0.010346			

Sumber : Hasil pengolahan Eviews 12

Hasil adjusted R Square menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) mempengaruhi Belanja Modal sebesar 0,140945 atau 14,0%. Sedangkan 86,0% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk model dalam penelitian ini.

4.9 Pembahasan

a. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Pada 22 Kabupaten/ Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur

Hasil uji t variabel Pendapatan Asli Daerah menunjukkan nilai t hitung sebesar 2.992250 dengan nilai signifikan sebesar 0.0040 lebih kecil dari tingkat alfa yang digunakan 0.05, maka keputusan menerima hipotesis alternative (H_a) dan menolak hipotesis nol (H_0), artinya secara parsial

variabel pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal pada 22 kabupaten/ kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Adanya pengaruh positif dan signifikan PAD terhadap Belanja Modal dapat dijelaskan bahwa semakin tinggi PAD, maka semakin tinggi pula Belanja Modal yang bisa dialokasikan oleh pemerintah daerah. PAD merupakan satu-satunya pendapatan yang dengan leluasa dapat diatur oleh pemerintah daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan daerah. Pendapatan Asli Daerah yang meningkat akan memberikan manfaat yang beragam bagi daerah mulai dari pemenuhan terhadap strategi pengembangan daerah hingga pembangunan daerah.

PAD yang meningkat tidak terlepas dari upaya peningkatan PAD itu sendiri yang mana pemerintah daerah harus menggunakan strategi tertentu untuk meraup PAD sebanyak-banyaknya. Pemerintah Daerah harus dapat menggali potensi-potensi daerah yang dimiliki dengan melibatkan beberapa *stakeholder*. Dengan melibatkan beberapa *stakeholder* maka tidak hanya PAD saja yang meningkat tetapi juga *output* bahkan *impact* lain yang didapatkan dari masing-masing *stakeholder*. Sinergitas beberapa *stakeholder* terkait diyakini dapat memperkuat serta memajukan daerah dari beberapa segi di daerah.

Dengan ditemukannya hasil penelitian ini, diharapkan masing-masing daerah dapat menggali potensi penerimaan daerahnya secara maksimal. Hasil Penelitian mendukung Made Ari Juniawan dan Ni Putu Santi Suryantini, Bakhrudi M. Arief Setiawan yang menyatakan bahwa

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal pada Kota Dan Kabupaten Di Provinsi Bali.

Hasil Penelitian ini tidak sejalan dengan yang dilakukan (Farhan, 2019) dan (Nur et al., 2018) yang menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Belanja Modal.

b. Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal pada 22 Kabupaten/ Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur

Hasil uji t variabel Dana Alokasi Umum menunjukkan nilai t hitung sebesar -0,906687 dengan nilai signifikan sebesar 0.3682 lebih besar dari tingkat alfa yang digunakan yakni 0.05, maka keputusan menolak hipotesis alternative (H_a) dan menerima hipotesis nol (H_0), artinya secara parsial variabel Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Belanja Modal pada 22 kabupaten/ kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Adanya pengaruh negatif DAU terhadap belanja modal dapat dijelaskan bahwa Dana Alokasi Umum tidak memiliki keterkaitan dengan pembangunan infrastruktur daerah. Dengan kata lain, Dana Alokasi Umum yang digelontorkan oleh Pemerintah Pusat tidak semuanya digunakan untuk Belanja Modal di daerah. Adapun hal-hal yang merupakan prioritas dan target-target nasional yang harus dicapai oleh daerah antara lain: stimulasi ekonomi daerah, peningkatan demokrasi, keadilan/pemerataan, dan kemampuan daerah dalam melayani masyarakat. Oleh karna itu peruntukan DAU telah ditetapkan dalam PMK dan harus dipatuhi oleh setiap daerah.

Dengan demikian pemerintah daerah tidak dapat mengatur kebijakannya sendiri untuk pengelolaan DAU selain mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Hasil mendukung penelitian yang dilakukan oleh Farhan Kresna Pramudya yang menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Namun tidak sesuai dengan Penelitian Made Ari Juniawan dan Ni Putu Santi Suryantini.

c. Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal pada 22 Kabupaten/ Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Hasil uji t variabel Dana Alokasi Khusus menunjukkan nilai t hitung sebesar 1.095852 dengan nilai signifikan sebesar 0.2775 lebih besar dari tingkat alfa yang digunakan yakni sebesar 0.05, maka keputusannya adalah menolak hipotesis alternative (H_a) dan menerima hipotesis nol (H_0), artinya secara parsial variabel Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Belanja Modal pada 22 kabupaten/ kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pengaruh positif DAK terhadap belanja modal dapat dijelaskan bahwa Dana Alokasi Khusus yang dialokasikan melalui APBN oleh pusat dan diberikan kepada pemerintah daerah untuk peningkatan keperluan daerah sesuai dengan kebijakan dan program nasional mampu meningkatkan infrastruktur sarana dan prasarana, fasilitas publik melalui peningkatan Belanja Modal. Pemberian bantuan pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Khusus untuk pemerintah daerah salah satu tujuannya yaitu

membayai kebutuhan penyediaan sarana dan prasarana fisik terutamanya infrastruktur. DAK terdiri dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik. DAK Fisik untuk mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan prioritas nasional yang meliputi kegiatan : Air Minum, Industri kecil dan Menengah (IKM), Irigasi, Jalan, Perikanan, Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Pariwisata, dan Pendidikan. DAK Nonfisik terdiri atas: Dana BOSP, Dana Tunjangan Guru ASN Daerah, Dana BOK, dan DAK Nonfisik Jenis Lainnya. Berdasarkan sasaran penggunaan DAK diatas dapat terlihat dengan sangat jelas bahwa DAK berpengaruh terhadap Belanja Modal, yang mana Belanja Modal terdiri dari Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, dan Belanja Modal Lainnya. Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Bakhrudin, M. Arief Setiawan, Sutrisno, Made Ari Juniawan dan Ni Putu Santi Suryantini.

d. Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal pada 22 Kabupaten/ Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur

Hasil uji t variabel Dana Bagi Hasil menunjukkan nilai t hitung sebesar 0,034884 dengan nilai signifikan sebesar 0.9723 lebih besar dari tingkat alfa yang digunakan yakni 0.05, maka keputusan menolak hipotesis alternative (H_a) dan menerima hipotesis nol (H_0), artinya secara parsial variabel Dana Bagi Hasil berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Belanja Modal pada 22 kabupaten/ kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pengaruh positif Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap belanja modal dapat dijelaskan bahwa dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Hal ini bertujuan untuk menyeimbangkan pembangunan nasional di seluruh daerah agar mengurangi ketimpangan antara daerah penghasil dan daerah bukan penghasil sumber daya alam. Kepada 22 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur mendapatkan Dana Bagi Hasil berupa PKB dan BBNKB, PBBKB, Pajak Rokok dan Pajak Air Permukaan. Besaran Alokasi DBH ini telah diatur dalam Peraturan Gubernur NTT yang diterbitkan sekali dalam setahun. Pendapatan DBH bagi 22 Kabupaten/Kota harus dianggarkan dalam APBD Kabupaten/Kota yang mana penggunaannya dijabarkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah terkait di Kabupaten/Kota serta disinkronkan kedalam program dan kegiatan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2021, pemanfaatan DBH telah dipatok besarnya untuk pembangunan dan pelayanan di daerah. Pemanfaatan DBH yang bersumber dari PKB dialokasikan paling rendah 10% untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan transportasi dan sarana transportasi umum. DBH dari Pajak Rokok dialokasikan paling rendah 50% untuk pelayanan kesehatan. Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Bakhrudin, M. Arief Setiawan, Sutrisno.

e. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal pada 22 Kabupaten/ Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur

Hasil uji F untuk melihat pengaruh secara bersama-sama variabel bebas terhadap variabel terikat, diperoleh hasil nilai F hitung sebesar 3,625113 dengan nilai signifikansi 0,010 lebih kecil dari tingkat alfa yang digunakan yakni 0,05, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa secara bersama-sama pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal pada 22 kabupaten/ kota se-Provinsi NTT.

Hasil analisis di atas menunjukkan bahwa Pengelolaan Keuangan di daerah tidak terlepas dari Pendapatan dan Belanja, dan bagaimana cara untuk mengelolanya. Agar Program dan Kegiatan di daerah dapat berjalan dengan lancar tentunya membutuhkan dana yang berasal dari pusat maupun dari daerah itu sendiri. Dalam penelitian ini, penulis mengambil satu belanja dalam komponen APBD yakni belanja modal untuk dijadikan bahan penelitian dalam mengetahui seberapa besar pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap Belanja Modal.

Melihat hasil di atas bahwa secara simultan pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal pada 22 kabupaten/ kota se-Provinsi NTT maka dapat disimpulkan bahwa komponen-komponen di atas merupakan komponen pendukung yang menyokong keberlangsungan

program-program pemerintah dalam rangka memajukan daerah. Tentunya tidak terlepas dari berbagai upaya untuk menaikkan besaran alokasi dana yang harus ditarik dari pusat untuk daerah. Banyak indikator yang harus dipenuhi daerah untuk mendapatkan dana-dana tersebut yang mana semuanya tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang harus ditaati.